

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

<http://jhii.fisip.unila.ac.id/ojs/index.php/jhii>

POTENSI DAN TANTANGAN PARADIPLOMASI BANDAR LAMPUNG

Khairunnisa Simbolon^{a,1}

^a Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
Khairunnisa.simbolon@fisip.unila.ac.id¹

ABSTRAK

Paradiplomasi menjadi kajian baru dalam studi ilmu hubungan internasional. Perubahan pola interaksi antar negara yang disebabkan perkembangan teknologi dan globalisasi memaksa negara sebagai aktor utama merubah perilaku interaksinya dan membuka jalan bagi aktor subnasional untuk melakukan Kerjasama luar negeri. Bandar Lampung sebagai salah satu kota berkembang dan memiliki potensi baik manusia dan alam, ternyata belum memiliki Kerjasama paradiplomasi yang berhasil sampai pada tahap implementasi. Argumen utama penelitian ini adalah pentingnya identifikasi potensi dan tantangan oleh aktor subnasional untuk bisa memaksimalkan Kerjasama paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis dan menemukan fakta potensi Bandar Lampung di berbagai bidang seperti ekonomi, pariwisata, sumber daya alam dan manusia, lingkungan dan pemanfaatan teknologi. Namun tantangan yang ditemukan adalah belum adanya langkah nyata pemerintah Kota untuk melaksanakan Kerjasama paradiplomasi. Tantangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan Kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah, komunitas Pendidikan, dan masyarakat.

Kata Kunci: Paradiplomasi, Potensi, Tantangan, Kerjasama

ABSTRACT

Paradiplomacy is a new study in the study of international relations. Changes in the pattern of interaction between countries caused by technological developments and globalization have forced the state as the main actor to change its interaction behavior and pave the way for subnational actors to conduct foreign cooperation. Bandar Lampung as one of the developing cities and has the potential for both human and nature, it turns out that it does not yet have a successful para-diplomacy cooperation until the implementation stage. The main argument of this research is the importance of identifying potentials and challenges by sub-national actors in order to maximize para-diplomacy cooperation. This study uses an analytical qualitative approach and finds facts about the potential of Bandar Lampung in various fields such as economy, tourism, natural and human resources, environment and technology utilization. However, the challenge found is that there are no concrete steps from the City government to implement Paradiplomatic Cooperation. This challenge can actually be overcome by cross-sectoral collaboration, starting from the government, the education community, and the community.

Keywords: Paradiplomacy, Potential, Challenges, cooperation.

1. PENDAHULUAN

Kajian ilmu hubungan internasional selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perubahan pola interaksi negara. Negara dengan segala permasalahan dan kepentingannya, memiliki kebiasaan yang berbeda jika dibandingkan dengan beberapa dekade lalu. Pada masa perang dingin misalnya, corak hubungan antar negara identik dengan polaritas dan perimbangan kekuatan. Bergerak pada awal 2000an, negara disibukkan dengan lonjakan perkembangan globalisasi yang memaksa negara untuk lebih giat melakukan hubungan dengan negara lain, pasar bebas dan sebagainya. Globalisasi serta revolusi industri yang sangat massive tidak bisa ditolak memang merubah pola interaksi antar negara ke arah seperti sekarang ini. Negara paling tertutup sekalipun tetap memiliki Kerjasama terbatas dengan beberapa negara agar dapat *survive*.

Konektivitas antar negara yang massive ini merubah pola hubungan antar negara yang pada awalnya *state centric*. Aktor non negara memiliki kepentingan yang bisa dikomunikasikan melampaui batas negara, dan berkesempatan mempromosikan potensi yang mereka miliki diluar batas negara. Di Indonesia, hal ini didukung pula oleh pemberian hak otonomi yang diberikan pada daerah pasca runtuhnya orde baru. Rezim otoriter yang berlangsung puluhan tahun memerlukan wajah dan *image* baru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu upayanya adalah membagi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu wilayah (*trias politica*). Peraturan perundang-undangan pertama yang dikeluarkan pemerintah terkait pembagian kekuasaan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, sampai saat ini sudah ada 34 provinsi, 416 kabupaten dan 94 kota di seluruh Indonesia. Beberapa daerah mendapatkan otonomi khusus setelah 1999 dan Sebagian lagi menyusul setelah mendapatkan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hak otonom yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah tersebut menjadi pintu untuk aktor subnasional melakukan interaksi dengan negara lain. Pemerintah daerah kemudian memiliki otoritas, walaupun tidak mutlak untuk melakukan Kerjasama dengan pihak lain diluar batas negara. Interaksi jenis baru ini kemudian lebih dikenal dengan parallel diplomasi atau paradiplomasi. Defenisi sederhana dari paradiplomasi adalah hubungan atau interaksi luar negeri yang dilakukan oleh aktor subnasional untuk mencapai kepentingannya. Perlu diberikan penekanan pada “kepentingan”, yang berarti bahwa hubungan atau interaksi yang dilakukan aktor subnasional didasarkan pada kepentingan masing-masing aktor. Untuk itu aktor subnasional perlu memiliki pemahaman terhadap apa kepentingan yang ingin dicapai melalui interaksi tersebut. Paradiplomasi, sesuai namanya merupakan diplomasi yang dilakukan bersama dengan diplomasi tradisional yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, Ketika Kerjasama

paradiplomasi terjadi ada hubungan parallel antar negara tujuan dengan aktor subnasional di negara tersebut.

Kerjasama paradiplomasi yang dilakukan oleh beberapa aktor subnasional di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang berhasil. Kepentingan yang ingin dicapai oleh aktor dapat tercapai melalui Kerjasama yang baik antar aktor. Namun, pada beberapa kasus, Kerjasama paradiplomasi seperti Sister City misalnya, hanya menjadi ajang seremonial penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) tanpa ada implementasi nyata. Selain itu, meskipun telah diberikan hak otonom, namun otoritas yang dimiliki oleh aktor subnasional masih memiliki Batasan tertentu. Hambatan pengimplementasian lainnya adalah perbedaan peraturan yang berlaku di negara berbeda. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa paradiplomasi dikatalisatori globalisasi, sementara tidak semua negara memiliki pengalaman yang sama mengenai globalisasi.

Lampung memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota Madya, dengan jumlah populasi 9.081.792 jiwa, dimana sebanyak 12,62% tergolong kepada masyarakat miskin (BPS, 2021b). Secara geografis, Lampung merupakan pintu masuk ke Sumatera dari Pulau Jawa. Selain itu Lampung juga tergabung dalam Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) bersama dengan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Kinerja ekonomi Lampung berdasarkan neraca perdagangan sebesar 4837,14 juta dollar untuk nilai ekspor, dan 2217,03 juta dollar untuk nilai impor. Lebih spesifik, komoditi unggulan Provinsi Lampung adalah kopi, lada, sektor wisata, udang dan hasil perkebunan lainnya (BPS, 2021b).

Sampai saat penelitian ini dilakukan, Provinsi Lampung belum memiliki Kerjasama paradiplomasi. Pada tahun 2017 sempat ada rencana kerjasama Sister City dengan Kota Los Rios, Ekuador, namun tampaknya terhambat (Bappeda, 2017). Jawa Barat misalnya, beberapa kota dan kabupatennya sudah melakukan Kerjasama paradiplomasi seperti, Kota Bandung-Suwon, Bandung-Liuzhuo, dan Bandung-Braunschweig (Bagian Kerjasama, 2022). Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki Kerjasama paradiplomasi dengan beberapa kota seperti dengan Kyoto, Gangbuk dan beberapa kota masih melakukan penjajakan (Jogjaprov.go.id, 2021). Dibandingkan provinsi-provinsi tersebut, Provinsi Lampung sebenarnya memiliki peluang untuk melakukan Kerjasama paradiplomasi, namun sampai saat ini belum terwujud.

Penelitian yang dilakukan oleh Ario Bimo Utomo dalam jurnal berjudul *Reimagining City Identities in Globalisation: A Constructivist Study on City Paradiplomacy* berargumen bahwa agar paradiplomasi yang dilakukan aktor subnasional dapat sukses dan tidak hanya menjadi seremonial belaka, aktor perlu memiliki pengetahuan tentang apa kebutuhannya. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, Utomo mengemukakan bahwa istilah *signaling* dalam

konstruktivisme berarti bahwa aktor subnasional harus menunjukkan sinyal agar dapat ditangkap oleh aktor subnasional lainnya (Utomo, 2020). Utomo memberikan contoh bagaimana Barcelona sukses melakukan paradiplomasi dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu keunikan, kelebihan dan kebutuhannya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari jurnal ini adalah bahwa aktor perlu mengetahui kebutuhannya, membangun citra diri dari kebutuhan tersebut, sehingga dapat ditemukan atau menemukan aktor subnasional lainnya untuk melakukan Kerjasama.

Studi tentang paradiplomasi di Indonesia sebenarnya belum begitu menjadi minat utama akademisi hubungan internasional. Namun, dua dekade kebelakang mulai bermunculan kajian-kajian tentang potensi paradiplomasi. Christi Damayanti pada tahun 2012 menulis jurnal *Potensi Paradiplomasi dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*. Damayanti berargumen bahwa paradiplomasi di Indonesia adalah konsekuensi dan bentuk komitmen pemerintah Indonesia atas kebijakan otonomi daerah pasca reformasi ((Damayanti, 2012). Fokus Damayanti adalah signifikansi paradiplomasi dalam mendukung kinerja diplomasi Indonesia dalam mendukung perwujudan Komunitas ASEAN. Apabila hubungan antar pemerintah daerah dan pusat dapat terjalin dengan baik, akan berdampak positif dalam membantu mewujudkan Komunitas ASEAN pada 2015 (saat itu targetnya adalah tahun 2015, sekarang menjadi 2025).

Jurnal lainnya ditulis oleh Laode Muhammad Fathun dengan Judul *Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency*. Fathun mendeskripsikan implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, dengan ide awal bahwa pemerintah kabupaten Jember seharusnya dapat melakukan Kerjasama dengan berbagai negara seperti Jepang dan Kanada. Pemerintah Jember bertujuan untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman dengan melakukan hubungan Kerjasama internasional melalui skema sister city dan smart city. Hasil telaah deskriptif Fathun menemukan bahwa bentuk Kerjasama paradiplomasi bersifat konservatif dan sejalan dengan Kementrian Luar Negeri Indonesia. Selain itu, Kerjasama Pendidikan adalah salah satu bidang yang berhasil dijalankan untuk memperkenalkan Jember kepada warga negara asing (Fathun, 2021).

Studi literature paradiplomasi yang dilakukan oleh pengkaji hubungan internasional Indonesia hampir pasti akan melibatkan pemikiran dari Takdir Ali Mukti. Salah satu dari sekian banyak jurnalnya mengenai paradiplomasi, berjudul *Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea*. Takdir Bersama penulis lainnya dalam jurnal ini melakukan studi perbandingan kebijakan paradiplomasi Indonesia dan Korea, dengan dasar pemikiran bahwa kedua negara memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan tersebut antara lain, bentuk negara

kesatuan serta pemberlakuan otonomi daerah di waktu yang bersamaan (1998). Telaah kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji tipe paradiplomasi kedua negara. Hasilnya, walaupun memiliki kesamaan, tapi aktifitas paradiplomasi Indonesia dan Korea berbeda. Aktor subnasional di Indonesia memiliki batasan dari peraturan nasional, sedangkan Korea memberikan lebih banyak wewenang pada aktor subnasionalnya untuk melakukan hubungan paradiplomasi di berbagai wilayah dunia. Temuan menarik lainnya dari kajian ini adalah, kebijakan paradiplomasi kedua negara juga dipengaruhi kondisi politik domestik, dan Gerakan regional yang mendukung (Mukti et al., 2021).

Penelitian Utomo memberikan pandangan bahwa aktor subnasional perlu memiliki pengetahuan terhadap potensinya agar dapat melakukan aktifitas paradiplomasi nyata bukan hanya seremonial. Sejalan itu, Damayanti menekankan pada harmoni pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar Kerjasama paradiplomasi dapat maksimal. Fathun menemukan bahwa Jember melakukan paradiplomasi di bidang Pendidikan, yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Mukti menemukan Batasan yang didapatkan dari peraturan nasional ternyata berdampak pada aktifitas paradiplomasi. Penelitian-penelitian terkait paradiplomasi di atas seluruhnya menjadikan Indonesia dan atau substate Indonesia sebagai objek kajiannya, meskipun dengan pendekatan teoritis yang cukup beragam. Namun, kita bisa menarik benang merah dari tulisan-tulisan tersebut, yakni pentingnya pengetahuan tentang potensi daerah agar dapat memaksimalkan kerangka paradiplomasi. Untuk itu, pada penelitian ini, penulis akan menganalisis potensi-potensi paradiplomasi Bandar Lampung serta mencoba mengidentifikasi tantangan-tantangannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif analitis. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan mengenai apa saja potensi dan tantangan terhadap paradiplomasi Lampung secara komprehensif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi Pustaka dengan bergantung pada data-data sekunder yang berasal dari data statistik, laporan pemerintah, hasil penelitian Lembaga-lembaga penelitian serta sumber lainnya yang dapat mendukung analisis penelitian.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama analisis, sehingga perlu sekali untuk memastikan validitas dari data-data yang dipakai. Oleh karena itu, upaya peneliti untuk memastikan bahwa data-data yang ditampilkan dalam penelitian ini valid, akan dilakukan tiga tahapan, yakni kondensasi data, penyajian data serta verifikasi data (Miles et al., 2014),

3. POTENSI DAN TANTANGAN PARADIPLOMASI BANDAR LAMPUNG

Paradiplomasi, sama seperti jenis interaksi antar negara lainnya dalam kajian internasional. Yang membedakan hanya aktor yang melakukan interaksi serta Batasan-batasannya. Pada kajian mainstream, aktor yang memiliki wewenang mutlak adalah negara, sementara paradiplomasi mengakui peranan-peranan aktor subnasional dalam hubungan internasional. Dengan asumsi demikian, maka tujuan aktor dalam melakukan interaksi pasti didasarkan kepentingannya. Seperti aktor negara yang berusaha mencapai kepentingan nasionalnya, aktor pada subnasional juga memiliki kepentingan. Ketika melakukan hubungan sejenis paradiplomasi. Aktor pada level subnasional memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Faktor geografis, sumber daya baik alam maupun manusia, keunikan wilayah, budaya dan faktor lainnya menjadikan hampir tidak ada aktor subnasional yang memiliki identitas yang sama.

Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat perekonomian serta kota madya dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Lampung, yakni sebanyak 1.2 juta jiwa (BPS, 2020b). Sebagai kota pusat administrasi provinsi, Bandar Lampung memiliki keuntungan dalam sektor ekonomi, pariwisata dan Pendidikan. Berdasarkan laporan dari Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, terdapat 197 industri menengah, 3.92 industri kecil, dan 8.158 industri rumah tangga yang ada di Kota Bandar Lampung (BPS, 2020a). Potensi ekonomi lainnya adalah arus barang ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 3.4 juta ton ekspor dan 2 juta ton produk impor yang melalui Pelabuhan Panjang, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.1 Volume Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Panjang

Ekspor-Impor	Volume Ekspor dan Impor melalui Pelabuhan Panjang (Ton)		
	2019	2020	2021
Ekspor	335.6736	301.8845	345.4942
Impor	188.7985	190.0318	201.2215
Jumlah	524.4721	491.9164	647.3787

Sumber: BPS, 2021

Sektor pariwisata Bandar Lampung juga merupakan potensi yang bisa menjadi nilai lebih. Meskipun secara geografis tidak seberagam kabupaten lain di Lampung, namun posisi strategis Bandar Lampung yang dekat dengan pusat wisata di Kalianda, Pesawaran, serta tol trans sumatera yang sudah beroperasi, meningkatkan potensi pariwisata perhotelan. Berdasarkan data BPS, kurun waktu 2019-2021 terjadi penambahan jumlah hotel di Kota Bandar Lampung, yakni 112 hotel pada tahun 2019, 118 hotel pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 133

hotel di tahun 2022 (BPS, 2021a). Dengan pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai sekarang, ternyata industri perhotelan masih bisa tumbuh. Wisatawan yang datang ke Lampung beragam mulai dari wisatawan lokal Bandar Lampung, dari Sumatera Selatan (jarak tempuh setelah adanya tol trans sumatera meningkatkan kunjungan wisatawan asal Sumatera Selatan), dari Pulau Jawa, bahkan wisatawan asing (Antara, 2021). Terdapat 63 destinasi wisata di Kota Bandar Lampung, beragam mulai dari wisata bahari, wisata panorama alam, hutan kota, wisata budaya seperti museum dan bangunan bersejarah, pusat perbelanjaan, pusat kuliner dan sebagainya (BPS, 2020c).

Selain sektor ekonomi dan pariwisata, potensi lain yang dimiliki oleh Bandar Lampung adalah sumber daya manusianya. Jumlah penduduk Bandar Lampung sebesar 1.2 juta jiwa memiliki beragam potensi yang bisa dieksplorasi. Kualitas hidup masyarakat Bandar Lampung dapat dilihat dari laporan indeks pembangunan manusia (lihat tabel 1.2). Angka harapan hidup rata-rata mencapai 71 tahun, angka melek huruf 99%, rata-rata lama sekolah selama 11 tahun dan pengeluaran perkapita tahunan 12juta.

Tabel 1.2: Indeks Pembangunan Manusia Bandar Lampung

IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (th)	71.28	71.37	71.42
Angka Melek Huruf (%)	99.41	99.24	99.18
Rata-rata Lama Sekolah (th)	10.92	10.93	10.95
Pengeluaran per Kapita Tahun (RP)	12255.00	12197.00	12247.00

Sumber: BPS, 2021

Potensi lainnya yang masih berkaitan dengan sumber daya manusia adalah sektor Pendidikan. Kota Bandar Lampung yang memiliki banyak sekali fasilitas Pendidikan, baik swasta maupun negeri menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menempuh Pendidikan. Data yang didapat dari Universitas Terbuka, terdapat belasan fasilitas Pendidikan setingkat perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, baik swasta maupun negeri yang ada di Bandar Lampung (UT, 2011). Perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Institute Teknologi Sumatera dan berbagai perguruan tinggi lainnya bisa menjadi pembuka jalan bagi terbukanya Kerjasama paradiplomasi dengan aktor subnasional diluar batas negara.

Permasalahan lain yang sebenarnya potensial untuk dicari penanggulangannya dengan skema Kerjasama paradiplomasi adalah permasalahan lingkungan. Dampak kehidupan manusia dan aktifitasnya tidak bisa dipungkiri pasti mengubah lingkungan tempat tinggal manusia itu sendiri. Permasalahan lingkungan di Bandar Lampung seperti pengelolaan sampah, masalah limbah, dan polusi bisa ditemukan pemecahan masalahnya melalui Kerjasama paradiplomasi.

Studi yang dilakukan Ajrina dari Institute Teknologi Sumatera (ITERA) yang berada di Bandar Lampung menunjukkan bahwa setiap harinya 800 ton sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dan baru 65%nya saja penduduk yang mendapatkan pelayanan pembuangan sampah pemerintah (Ajrina et al., 2016). Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di Bandar Lampung sebanyak 77 titik, dan dari tiga bank sampah, hanya satu saja yang berfungsi.

Identifikasi di atas menunjukkan bahwa banyak sekali potensi Kerjasama yang hadir dari bukan saja potensi, tetapi permasalahan yang dihadapi Bandar Lampung sebagai sebuah kota. Belajar dari pengalaman kota yang sudah melakukan Kerjasama paradiplomasi, misalnya Bandung, sudah banyak memberikan dampak positif bagi pengembangan kotanya. Pada aspek ekonomi misalnya, Bandung melakukan Kerjasama dengan beberapa aktor subnasional seperti Kota Cuenca Ecuador, Kota Namur Belgia, Kota Forthworth Amerika Serikat, Kota Suwon dan Seoul Korea Selatan, Kota Yingkou dan Shenzen Tiongkok, Kota Petaling Malaysia, Kota Hamamatsu dan Kawasaki Jepang (Bagian Kerjasama, 2022). Bandung merupakan kota yang berhasil memanfaatkan skema Kerjasama paradiplomasi untuk membangun kotanya. Selain Bandung, Kota Semarang juga salah satu kota yang aktif melakukan Kerjasama paradiplomasi dengan berbagai kota. Semarang melakukan Kerjasama paradiplomasi dengan Kota Brisbane Australia, Kota Beihai, Nanjing, dan Fuzhou Tiongkok, Kota Split Kroasia, Kota Schieland Belanda, dan Kota Junggu Korea Selatan.

Bandung secara aktif sudah melakukan Kerjasama paradiplomasi dengan banyak kota, dan masing-masing Kerjasama memiliki keistimewaan sendiri. Kerjasama Bandung dengan Braunscheigh Jerman yang memiliki ruang lingkup kebudayaan, Pendidikan, peningkatan sektor pariwisata, olahraga dan pertukaran pemuda, dan ekonomi misalnya, implementasi dari Kerjasama tersebut banyak sekali. Bandung mendapat bantuan alat kesehatan, alat-alat industry, bantuan pelatihan SDM pemerintah Bandung, bantuan bagi perguruan tinggi, pertukaran budaya dan transfer teknologi dalam manajemen perpustakaan Kota Braunschweig. Kerjasama Bandung dengan Kota Suwon yang memiliki ruang lingkung di bidang perdagangan, pemuda dan olahraga serta investasi juga sudah terimplementasi pada berbagai bentuk Kerjasama. Implementasi tersebut berupa kegiatan perdagangan dan bisnis pelaku usaha dan industry Suwon, dan sebaliknya. Bahkan pada saat Covid-19 lalu, Pemerintah Suwon dan Seoul juga mengirimkan bantuan alat-alat kesehatan untuk masyarakat Bandung (Bagian Kerjasama, 2022). Implementasi lainnya berupa penataan dan revitalisasi sungai Cikapundung dengan Kota Seoul, dan peningkatan kemampuan tingkat kebocoran air yang menyebabkan permasalahan lingkungan.

Bandung juga mendapatkan manfaat di bidang teknologi, budaya, Pendidikan dan manajemen kota dari berbagai Kerjasama yang dilakukan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Kota Semarang dalam kerjasamanya dengan Kota Brisbane Australia. Implementasi Kerjasama yang dilakukan dengan Brisbane dan Beihai misalnya, berhasil diwujudkan dalam bentuk kegiatan peningkatan wawasan dan pengembangan kapasitas pegawai pemerintah. Selain itu, Semarang juga melakukan Kerjasama dengan Griffith University Australia di bidang Pendidikan (Otda, 2022).

Surabaya juga memanfaatkan Kerjasama ini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di kotanya. Misalnya kerjasama Surabaya-Liverpool yang salah satu poin kesepakatannya adalah pelayanan logistik. Karakteristik kota Surabaya dan Liverpool di Inggris yang sama-sama kota dengan sejarah maritim. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya memanfaatkan Kerjasama ini untuk mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan untuk pengembangan Pelabuhan dari Pelabuhan di Liverpool (Ibrahim, 2017). Selain itu, Surabaya yang memiliki wilayah pantai juga memiliki masalah abrasi dan melakukan Kerjasama dengan kota Kitakyushu (Surabaya Bangga, 2020). Kerjasama di bidang lingkungan ini berupa penelitian ekosistem mangrove dengan mendatangkan tenaga ahli asal Kota Kitakyushu, pemberian alat dan teknologi serta pengetahuan mengenai pengelolaan mangrove.

Kerjasama paradiplomasi menurut Lecours, seperti dikutip dari Mukti mengkategorikan paradiplomasi ke dalam tiga kelompok, yaitu tujuan ekonomi, multipurpose, dan yang ketiga adalah paradiplomasi kompleks (Mukti, 2015). Tipe pertama fokus pada tujuan-tujuan ekonomi semata tanpa ada unsur apapun, sementara yang kedua melibatkan unsur ekonomi, budaya, Pendidikan, kesehatan, transfer teknologi, sementara bentuk ketiga melibatkan unsur-unsur politik dan identitas. Dengan menggunakan asumsi ini, kita bisa melihat bahwa jenis Kerjasama bentuk kedua banyak dilakukan oleh Bandung, Surabaya dan Semarang. Untuk itu, penulis akan fokus menganalisis dengan bentuk kedua ini pula.

Kota Bandar Lampung dengan segala potensi yang sudah dijabarkan sebelumnya, sayangnya sampai penelitian ini dilakukan belum memiliki Kerjasama paradiplomasi yang berhasil pada tahap implementasi. Hal ini merupakan tantangan paradiplomasi Kota Bandar Lampung yang perlu diselesaikan lintas sektor. Belajar dari banyaknya manfaat yang didapatkan kota-kota yang telah berhasil mengimplementasikan paradiplomasi, pemerintah Bandar Lampung seharusnya melakukan kajian yang dapat membantu pelaksanaan paradiplomasi. Pemerintah saja juga tidak dapat bergerak sendiri untuk melakukan kajian-kajian paradiplomasi ini, kelompok masyarakat lainnya juga perlu berupaya mendorong sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Kelompok

akademik misalnya, bisa membantu melahirkan kajian-kajian sejenis artikel ini untuk membantu pemerintah mencari bentuk terbaik pelaksanaan paradiplomasi. Perguruan-perguruan tinggi di Bandar Lampung harus mendorong pemerintah dengan kajian-kajian dan hasil penelitian yang dapat dijadikan katalis untuk mempercepat pemerintah melakukan Kerjasama luar negeri.

Tantangan selanjutnya adalah bukan hanya melaksanakan Kerjasama paradiplomasi, tapi yang terpenting adalah bagaimana agar Kerjasama tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak berakhir pada kegiatan seremonial belaka. Untuk itu, sebelum melakukan Kerjasama perlu merumuskan kepentingan-kepentingan yang akan dicapai melalui skema Kerjasama paradiplomasi. Selain itu, dengan mengenali potensi terbaik dan permasalahan yang ingin diselesaikan, Bandar Lampung bisa menemukan mitra kota yang benar-benar bisa membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan pengelolaan sampah misalnya, Bandar Lampung bisa merintis Kerjasama dengan kota-kota yang memiliki pengelolaan sampah yang baik seperti Seoul, Jepang atau kota-kota Eropa lainnya. Belajar dari Kerjasama Surabaya-Liverpool yang kemudian dimanfaatkan oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Bandar Lampung yang memiliki Pelabuhan Panjang juga bisa merintis Kerjasama dengan kota-kota Pelabuhan dunia dengan pengelolaan yang baik seperti kota-kota di Jepang.

Perguruan tinggi di Bandar Lampung juga bisa menginisiasi Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan penelitian. Begitupun dari sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan, budaya, perlu ditelaah lebih lanjut kota mana yang dapat dicontoh oleh Bandar Lampung pengelolaannya. Universitas Lampung sudah memiliki Kerjasama dengan kampus-kampus di Kroasia, Jepang, Malaysia dan lain-lain. Inisiasi Kerjasama perguruan tinggi ini dapat ditingkatkan untuk menjadi Kerjasama antar kota tempat perguruan tinggi tersebut berada. Namun belum ada Kerjasama antar perguruan tinggi Bandar Lampung yang dilanjutkan dengan Kerjasama antar kota.

4. KESIMPULAN

Kerjasama paradiplomasi berhasil dimanfaatkan berbagai kota di dunia untuk menyelesaikan permasalahan dan memaksimalkan potensinya. Kota-kota di Indonesia juga sudah banyak yang berhasil melaksanakan kerjasama dan mendapatkan manfaat dalam pengembangan dan tata Kelola kotanya seperti Bandung, Surabaya, dan Semarang. Implementasi paradiplomasi membantu kota-kota tersebut melalui alih informasi, teknologi, pertukaran pelajar, pameran budaya, riset Bersama dan bentuk Kerjasama lainnya. Bandar Lampung memiliki potensi ekonomi, pariwisata, sumber daya alam dan manusia, Pendidikan dan budaya, serta permasalahan-permasalahan seperti lingkungan, pengelolaan

Pelabuhan dan manajemen sumber daya belum berhasil melaksanakan Kerjasama paradiplomasi. Tantangan ini membutuhkan Kerjasama lintas sektor agar Kerjasama paradiplomasi berdampak positif terhadap pembangunan dan tata Kelola kota Bandar Lampung. Kajian mengenai paradiplomasi Bandar Lampung perlu ditingkatkan agar mendorong pemerintah untuk lebih aktif melakukan Kerjasama luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrina, F. I., Tiara Putri, H., & Maryati, S. (2016). Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah Journal Of Planning And Policy Development. *Journal Of Planning And Policy Development*, 32(2).
- Antara. (2021). *Berkah Tol Sumatera, Pariwisata Lampung Selatan Meningkatkan*. Okezone.Com.
<https://travel.okezone.com/read/2021/06/15/406/2425384/berkah-tol-sumatera-pariwisata-lampung-selatan-meningkat>
- Bagian Kerjasama. (2022). *Sister City Bandung*.
<http://kerjasama.bandung.go.id/category/sub-bagian/luar-negeri/sister-city>
- Bappeda. (2017). *Ekuador Dan Provinsi Lampung Jajaki Kerjasama Sister City*.
<http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-ekuator-dan-provinsi-lampung-jajaki-kerjasama-sister-province.html>
- BPS. (2020a). *Banyaknya Usaha Industri di Kota Bandar Lampung, 2016-2020*.
- BPS. (2020b). Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. In *BPS Bandar Lampung*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2020c). *Objek Wisata di Kota Bandar Lampung 2020*. BPS Bandar Lampung.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2021/05/25/363/nama-objek-wisata-di-kota-bandar-lampung-2020.html>
- BPS. (2021a). *Jumlah Hotel Menurut Kecamatan 2019-2021*.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/16/236/1/jumlah-hotel-menurut-kecamatan.html>
- BPS. (2021b). Jumlah Penduduk Miskin. In *Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/07/15/Jumlah-Penduduk-Miskin-Indonesia-Capai-2754-Per-Maret-202* (p. ii).
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2754-per-maret-202>

- Damayanti, C. (2012). Potensi Paradiplomasi dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN. *Transformasi*, XIV(22), 1–4.
- Fathun, L. M. (2021). Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency. *Indonesian Perspective*, 6(2), 166–186. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43542>
- Ibrahim, A. M. (2017). *Tanjung Perak Kembangkan “Sister City” Dengan Pelabuhan Liverpool*. Jatim.News. <https://jatim.antaranews.com/berita/244836/tanjung-perak-kembangkan-sister-city-dengan-pelabuhan-liverpool>
- Jogjaprovo.go.id. (2021). *Dubes Ceko Bertemu Gubernur DIY, Bahas Konektivitas Hingga Sister City*. Jogjaprovo.Go.Id. <https://jogjaprovo.go.id/public/berita/dubes-ceko-bertemu-gubernur-diy-bahas-konektivitas-hingga-sister-city>
- Miles, M., Haberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Source Book. In *Sage Publication* (Vol. 3).
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 1(1), 85–94.
- Mukti, T. A., Fathun, L. M., Muhammad, A., Sinambela, S. I., & Riyanto, S. (2021). Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 139–152. <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.8931>
- Otda. (2022). *Perjanjian Kerjasama dan MoU Luar Negeri Pemerintah Kota Semarang*. Otda.Semarangkota. <https://otda.semarangkota.go.id/luar-negeri>
- Surabaya Bangga. (2020). *Bagian Kerjasama Sister City, Pemkot Surabaya Gandeng Kitakyushu Teliti Ekosistem Mangrove*. <https://bangga.surabaya.go.id/2020/02/28/bagian-kerjasama-sister-city-pemkot-surabaya-gandeng-kitakyushu-teliti-ekosistem-mangrove/>
- UT. (2011). *Perguruan Tinggi di Bandar Lampung*. Universitas Terbuka. <https://lampung.ut.ac.id/626/>
- Utomo, A. B. (2020). Reimagining City Identities in Globalisation: A Constructivist Study on City Paradiplomacy. *Global South Review*, 1(2), 33. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.54362>